

### III. KERANGKA TEORI

#### 3.1. Migrasi Penduduk

Secara sederhana migrasi didefinisikan sebagai aktivitas perpindahan. Sedangkan secara formal, migrasi didefinisikan sebagai perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain yang melampaui batas politik/negara ataupun batas administrasi/batas bagian suatu negara. Bila melampaui batas negara maka disebut dengan migrasi internasional (migrasi internasional). Sedangkan migrasi dalam negeri merupakan perpindahan penduduk yang terjadi dalam batas wilayah suatu negara, baik antar daerah ataupun antar propinsi. Pindahnya penduduk ke suatu daerah tujuan disebut dengan migrasi masuk. Sedangkan perpindahan penduduk keluar dari suatu daerah disebut dengan migrasi keluar (Depnaker, 1995).

Menurut BPS (1995) terdapat tiga jenis migran antar propinsi, yaitu :

1. Migran semasa hidup (*life time migrant*) adalah mereka yang pindah dari tempat lahir ke tempat tinggal sekarang, atau mereka yang tempat tinggalnya sekarang bukan di wilayah propinsi tempat kelahirannya.
2. Migran risen (*recent migrant*) adalah mereka yang pindah melewati batas propinsi dalam kurun waktu lima tahun terakhir sebelum pencacahan.
3. Migran total adalah orang yang pernah bertempat tinggal di tempat yang berbeda dengan tempat tinggal pada waktu pengumpulan data.

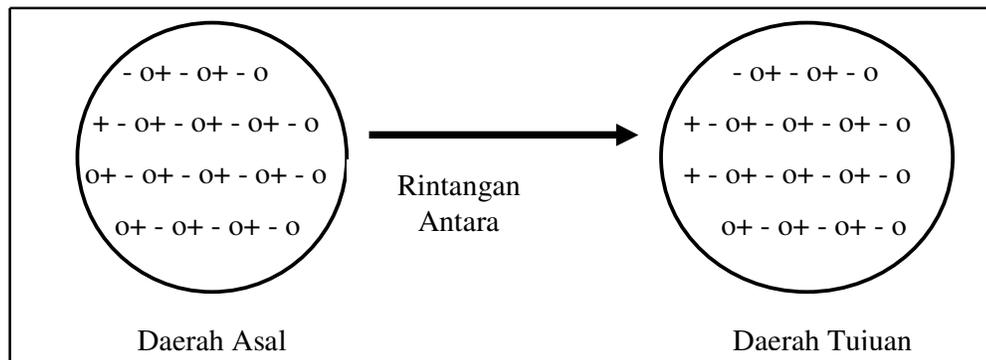
Berdasarkan tiga jenis migran tersebut, maka jenis migran yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis migran semasa hidup (*life time migrant*).

### 3.1.1. Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Migrasi

Dalam keputusan bermigrasi selalu terkandung keinginan untuk memperbaiki salah satu aspek kehidupan, sehingga keputusan seseorang melakukan migrasi dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor. Menurut Lee (1987) ada empat faktor yang perlu diperhatikan dalam studi migrasi penduduk, yaitu :

1. Faktor-faktor daerah asal
2. Faktor-faktor yang terdapat pada daerah tujuan
3. Rintangan antara
4. Faktor-faktor individual

Faktor-faktor 1,2 dan 3, secara skematis dapat dilihat pada Gambar 2 ( Lee, 1987):



**Gambar 2. Faktor-faktor yang Terdapat di Daerah Asal dan Daerah Tujuan serta Rintangan Antara**

Pada masing-masing daerah terdapat faktor-faktor yang menahan seseorang untuk tidak meninggalkan daerahnya atau menarik orang untuk pindah ke daerah tersebut (faktor +), dan ada pula faktor-faktor yang memaksa mereka

untuk meninggalkan daerah tersebut (faktor -). Selain itu ada pula faktor-faktor yang tidak mempengaruhi penduduk untuk melakukan migrasi (faktor o). Diantara keempat faktor tersebut, faktor individu merupakan faktor yang sangat menentukan dalam pengambilan keputusan untuk migrasi. Penilaian positif atau negatif terhadap suatu daerah tergantung kepada individu itu sendiri.

Besarnya jumlah pendatang untuk menetap pada suatu daerah dipengaruhi besarnya faktor penarik (*pull factor*) daerah tersebut bagi pendatang. Semakin maju kondisi sosial ekonomi suatu daerah akan menciptakan berbagai faktor penarik, seperti perkembangan industri, perdagangan, pendidikan, perumahan, dan transportasi. Kondisi ini diminati oleh penduduk daerah lain yang berharap dapat memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Pada sisi lain, setiap daerah mempunyai faktor pendorong (*push factor*) yang menyebabkan sejumlah penduduk migrasi ke luar daerahnya. Faktor pendorong itu antara lain kesempatan kerja yang terbatas jumlah dan jenisnya, sarana dan prasarana pendidikan yang kurang memadai, fasilitas perumahan dan kondisi lingkungan yang kurang baik.

Todaro (1998) menyatakan migrasi merupakan suatu proses yang sangat selektif mempengaruhi setiap individu dengan ciri-ciri ekonomi, sosial, pendidikan dan demografi tertentu, maka pengaruhnya terhadap faktor-faktor ekonomi dan non ekonomi dari masing-masing individu juga bervariasi. Variasi tersebut tidak hanya terdapat pada arus migrasi antar wilayah pada negara yang sama, tetapi juga pada migrasi antar negara. Beberapa faktor non ekonomis yang mempengaruhi keinginan seseorang melakukan migrasi adalah:

1. Faktor-faktor sosial, termasuk keinginan para migran untuk melepaskan dari kendala-kendala tradisional yang terkandung dalam organisasi-organisasi sosial yang sebelumnya mengekang mereka.

2. Faktor-faktor fisik, termasuk pengaruh iklim dan bencana meteorologis, seperti banjir dan kekeringan.
3. Faktor-faktor demografi, termasuk penurunan tingkat kematian yang kemudian mempercepat laju pertumbuhan penduduk suatu tempat.
4. Faktor-faktor kultural, termasuk pembinaan kelestarian hubungan keluarga besar yang berada pada tempat tujuan migrasi
5. Faktor-faktor komunikasi, termasuk kualitas seluruh sarana transportasi, sistem pendidikan yang cenderung berorientasi pada kehidupan kota dan dampak-dampak modernisasi yang ditimbulkan oleh media massa atau media elektronik.

Teori *Neoclastic Economic Macro* menjelaskan bagaimana proses dan akibat dari perpindahan tenaga kerja yang berasal dari negara yang mengalami surplus tenaga kerja tetapi kekurangan kapital menuju negara yang kekurangan tenaga kerja, tetapi memiliki kapital yang berlimpah. Teori ini kurang memperhatikan bagaimana seseorang memutuskan untuk berpindah, sebab-sebab perpindahan, serta dengan cara apa ia berpindah. Teori ekonomi lainnya, yaitu teori *Neoclastic Economic Micro*, yang sebetulnya juga memperbincangkan soal pengambilan keputusan ditingkat individu migran, tetapi tidak mencoba menjelaskan persoalan, mengapa seseorang berpindah dengan cara tertentu, mengapa bukan dengan cara yang lain. Teori ini hanya merekomendasikan kepada para migran potensial itu, agar mempertimbangkan '*cost and benefit*' dari setiap perpindahan ke daerah tujuan yang memiliki potensi lebih besar dibandingkan dengan daerah asal migran (Massey, 1993 ; dan Kuper and Kuper, 2000).

Teori yang berasal dari perspektif demografi-ekonomi adalah teori *Segmented Labour Market*. Menurut teori ini, arus migrasi tenaga kerja dari suatu negara; ditentukan oleh adanya faktor permintaan (*demand*) pasar kerja, yang lebih tinggi di negara lain. Dalam teori ini, faktor penarik yakni pasar kerja (*pull factor*) terhadap arus migrasi tenaga kerja, jauh lebih dominan jika dibandingkan dengan faktor penekan lain untuk berpindah (*push factor*) yang ada di daerah asal. Namun demikian, teori ini kurang memberikan penjelasan yang rinci di tingkat mikro, bagaimana seseorang akhirnya memutuskan untuk berpindah atau tetap tinggal di daerah asalnya.

### **3.1.2. Transisi Migrasi**

Perubahan komposisi penduduk dari suatu wilayah akan berpengaruh timbal balik dengan kemampuan ekonomi masyarakat wilayah tersebut dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Masyarakat wilayah tersebut dapat saja pindah ke tempat lain, bila mereka merasakan hal-hal yang mendorong mereka melakukan hal-hal itu seperti lowongan pekerjaan yang sangat menyempit dan sumberdaya alam yang semakin langka. Sebaliknya untuk alasan serupa, masyarakat dari wilayah lain dapat masuk ke wilayah tersebut.

Skeldon (1990) mengembangkan tahap transisi migrasi menjadi tujuh tahap. Pertama, tahap masyarakat pratransi (*pretransitional society*). Pada tahap ini sebagian besar migrasi yang terjadi merupakan migrasi non permanen, yang tidak bertujuan untuk menetap, tetapi migrasi ini tidak harus berlangsung dalam jangka pendek. Pada tahap ini dapat juga menjadi mobilitas permanen dalam bentuk kolonisasi atau pembukaan daerah-daerah pertanian baru.

Kedua, tahap masyarakat transisi awal (*early transitional society*). Pada tahap ini terjadi percepatan migrasi non permanen ke daerah perkotaan, daerah perkebunan, atau daerah pertambangan. Pada tahap ini terlihat juga adanya migrasi penduduk dari suatu daerah perkotaan ke daerah perkotaan lain, dimana kota besar menjadi tujuan utama migrasi penduduk kota kecil dan menengah.

Ketiga, tahap masyarakat transisi menengah (*intermediate transitional society*). Pada tahap ini terlihat adanya migrasi dari daerah yang berdekatan dengan kota besar. Migrasi daerah sekitar kota besar ini menyebabkan stagnasi pada daerah sekitar kota besar tersebut. Migrasi dari daerah pedesaan ke pedesaan menurun dan mobilitas dari perkotaan ke perkotaan terus meningkat, disertai pula dengan mobilitas penduduk perempuan.

Keempat, tahap masyarakat transisi akhir (*late transitional society*). Pada tahap ini ditandai dengan munculnya *megacity*. Migrasi dari desa ke kota meningkat, dengan kota besar menjadi tujuan utama. Migrasi tidak lagi dari pedesaan ke kota kecil, kota menengah baru ke kota besar, tetapi dari pedesaan langsung ke kota besar, sehingga proporsi penduduk pedesaanpun menurun.

Kelima, tahap masyarakat mulai maju (*early advanced society*). Pada tahap ini urbanisasi telah melampaui 50 persen dan mobilitas dari pedesaan ke perkotaan mulai menurun. Mulai terjadi suburbanisasi dan dekonsentrasi penduduk perkotaan. Bersamaan dengan gejala tersebut, mobilitas non permanen lebih meningkat.

Keenam, tahap masyarakat maju lanjut (*late advanced society*). Pada tahap ini ditandai dengan terus terjadinya dekonsentrasi penduduk perkotaan. Penduduk perkotaan makin menyebar ke daerah perkotaan yang lebih kecil. Pada saat ini juga terjadi peningkatan arus masuk pekerja asing, terutama migran dari

negara yang masih berada pada tahap ke empat. Arus ulang alik terjadi dengan pesat. Semua arus migrasi ini dilakukan oleh penduduk laki-laki maupun perempuan.

Ketujuh, tahap masyarakat maju super (*super advanced society*). Tahap ini banyak diwarnai oleh adanya teknologi tinggi, termasuk teknologi informasi. Pada tahap ini mobilitas permanen semakin berkurang dan mobilitas non permanen semakin meningkat. Sistem transportasi diganti dengan sistem komunikasi. Orang tidak perlu lagi pindah tempat untuk saling komunikasi.

Berdasarkan tahap transisi yang diungkapkan oleh Skeldon tersebut, Indonesia saat ini masih berada pada tahap transisi keempat, yang terlihat dari semakin tingginya arus mobilitas penduduk ke kota-kota besar, khususnya kota-kota besar di Pulau Jawa.

### **3.1.3. Karakteristik Migran**

Karakteristik migran dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu karakteristik demografi, pendidikan dan ekonomi (Todaro, 1998).

#### **a. Karakteristik Demografi**

Para migran di negara berkembang umumnya terdiri dari pemuda yang berumur 15 hingga 24 tahun. Sedangkan migran wanita dapat dikelompokkan dalam dua tipe yaitu (1) migrasi wanita sebagai **pengikut**. Kelompok migran ini terdiri dari para istri dan anak-anak perempuan yang mengikuti migran utama yaitu laki-laki yang menjadi suami atau ayah mereka. (2) Migran wanita **solo** atau **sendirian**, yaitu para wanita yang melakukan migrasi tanpa disertai oleh siapapun. Tipe ini yang sekarang terus bertambah dengan pesat.

#### **b. Karakteristik Pendidikan**

Beberapa hasil penelitian menunjukkan adanya korelasi yang nyata antara taraf pendidikan yang diselesaikan dengan kemungkinan atau dorongan personal untuk melakukan migrasi (*propensity to migrate*). Mereka yang bersekolah lebih tinggi, kemungkinan untuk bermigrasi lebih besar. Kondisi ini disebabkan oleh perolehan kesempatan kerja sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin besar kemungkinan untuk memperoleh pekerjaan dan semakin kuat keinginan untuk melakukan migrasi.

### **c. Karakteristik Ekonomi**

Selama beberapa tahun terakhir persentase terbesar para migran adalah mereka yang miskin, tidak memiliki tanah, tidak memiliki keahlian dan yang tidak memiliki kesempatan untuk maju di daerah asalnya. Para migran dari daerah pedesaan, baik laki-laki maupun perempuan dengan segala status sosioekonomi (mayoritas berasal dari golongan miskin) sengaja pindah secara permanen untuk mencari kehidupan yang lebih baik dan melepaskan diri dari belenggu kemiskinan di daerah-daerah pedesaan.

#### **3.1.4. Migrasi sebagai Investasi *Human Capital***

*Human capital* (modal tenaga kerja) merupakan dana individu yang diinvestasikan untuk memperoleh keahlian, pengetahuan dan pengalaman. Investasi dalam *human capital* membutuhkan pengorbanan pada masa sekarang tetapi dapat meningkatkan aliran pendapatan pada masa yang akan datang.

Sebagai pendekatan mikroekonomi, teori *Economic Human Capital* berasumsi bahwa seseorang akan memutuskan migrasi ke tempat lain, untuk memperoleh penghasilan yang lebih besar di daerah tujuan, dan asumsi ini dianalogikan sebagai tindakan melakukan investasi sumber daya manusia.

Menurut teori ini, investasi sumber daya manusia sama artinya dengan investasi di bidang usaha yang lain. Oleh karena itu jika seseorang telah memutuskan untuk berpindah ke tempat lain, berarti ia telah mengorbankan sejumlah pendapatan yang seharusnya ia terima di tempat asalnya, dan akan menjadi *opportunity cost* untuk meraih sejumlah pendapatan yang lebih besar di tempat tujuan migrasi. Disamping *opportunity cost* untuk perpindahan semacam itu, individu tersebut juga mengeluarkan biaya langsung dalam bentuk biaya migrasi. Seluruh biaya tersebut (biaya langsung dan *opportunity cost*) tadi dianggap sebagai investasi dari seorang migran. Imbalannya adalah, adanya arus pendapatan yang lebih besar di tempat tujuan. Teori keputusan pindah seperti ini kurang memperhatikan pengaruh dari faktor-faktor struktur sosial, pranata sosial (seperti determinan yang mempengaruhi orang pindah atau tidak pindah) maupun faktor yang lain seperti perbedaan tingkat upah riil dan biaya hidup di tempat yang baru, serta pengaruh agregat dari lingkungan (keluarga atau kerabat) calon migran.

Teori *human capital* juga meramalkan bahwa migrasi akan mengalir dari daerah-daerah yang relatif miskin ke daerah-daerah yang memiliki kesempatan kerja yang lebih baik. Hasil beberapa studi mengenai migrasi menyatakan bahwa faktor penarik kesempatan kerja yang lebih baik di daerah tujuan lebih kuat dibandingkan faktor pendorong dari daerah asal yang kesempatan kerjanya kecil (Ehrenberg dan Smith, 2003).

McConnell dan Stanley (1995) menyatakan sebelum migran memutuskan untuk bermigrasi, maka mereka harus memikirkan bahwa banyak biaya yang akan dikeluarkan seperti biaya transportasi, tidak memperoleh pendapatan selama mereka pindah, biaya-biaya psikis dari keluarga dan teman-teman dan kehilangan benefit dari kedudukan yang lebih tinggi dan dana pensiun. Jika *present value*

dari peningkatan pendapatan yang diharapkan melebihi biaya yang diinvestasikan, maka orang-orang memilih untuk pindah. Tetapi jika yang terjadi sebaliknya, maka orang tersebut akan menyimpulkan bahwa tidak ada manfaatnya untuk melakukan migrasi, meskipun pendapatan potensial pada daerah tujuan lebih tinggi daripada pendapatan di daerah mereka tinggal saat ini.

Ehrenberg dan Smith (2003) juga menyatakan bahwa migrasi mahal. Para pekerja harus menghabiskan waktu untuk mencari informasi mengenai pekerjaan yang lain, atau paling tidak pekerja tersebut harus mencari pekerjaan yang lebih efisien dari pekerjaan mereka sekarang. Selain itu, yang paling sulit bagi pekerja untuk migrasi adalah meninggalkan keluarga dan teman-teman mereka. Saat pekerjaan yang baru ditemukan, para pekerja akan berhadapan dengan masalah keuangan, psikis, dan biaya-biaya untuk pindah pada lingkungan yang baru. Singkatnya, para pekerja yang pindah pada pekerjaan yang baru menanggung biaya-biaya saat ini dan akan memperoleh utilitas yang tinggi pada masa yang akan datang. Oleh karena itu teori *human capital* dapat digunakan untuk menganalisis investasi mobilitas para pekerja. Seperti halnya McConnell dan Stanley (1995), Ehrenberg dan Smith menyatakan bahwa berdasarkan teori *human capital*, mobilitas pekerja merupakan investasi dimana biaya-biaya yang tanggung pekerja pada periode awal akan diperoleh kembali pada periode waktu yang akan datang. Jika *present value* dari keuntungan yang diperoleh jika melakukan mobilitas melebihi biaya, baik secara keuangan maupun psikis, maka para pekerja memutuskan untuk pindah. Tetapi jika terjadi sebaliknya, maka pekerja memutuskan untuk menolak pindah.

### **3.1.5. Beberapa Model Migrasi**

### 3.1.5.1. Model Migrasi Todaro

Todaro (1998) merumuskan suatu model migrasi yang dikenal dengan *Expected Income Model of Rural-Urban Migration*. Model ini berawal dari asumsi bahwa keputusan pertama untuk bermigrasi merupakan fenomena ekonomi yang menggambarkan tanggapan migran terhadap perbedaan pendapatan yang diharapkan di daerah tujuan. Oleh karena itu, keputusan seseorang untuk melakukan migrasi juga merupakan keputusan rasional yang didasarkan pada penghasilan yang diharapkan (*expected income*). Model dasar migrasi adalah:

$$MIG_t = f \{PINC_t, f(\Sigma WU_t / (r+1)^t, (\Sigma WR_t / (r+1)^t)), Z_t, e_t\} \dots\dots\dots (1)$$

dimana :

$MIG_t$  : tingkat migrasi desa kota

$PINC_t$  : peluang pendapatan seorang migran di sektor pekerjaan modern di kota, dimana :

$$PINC_t = \frac{AKT(1 - U_{t-1})}{U_{t-1}}, 0 < PINC_t < 1 \dots\dots\dots (2)$$

$AKT$  : tingkat pertumbuhan angkatan kerja di sektor modern di kota

$U_t$  : tingkat pengangguran di kota waktu t

$(\Sigma WU_t / (r+1)^t)$  : upah nyata di daerah tujuan pada tingkat *discount* tertentu pada waktu t

$(\Sigma WR_t / (r+1)^t)$  : upah nyata di daerah asal pada tingkat *discount* tertentu pada waktu t

$Z_t$  : faktor lain

$e_t$  : error term.

Asumsi dasar dari model ini adalah para migran selalu mempertimbangkan dan membandingkan pasar kerja di daerah asal dan daerah tujuan. Apabila pasar kerja di daerah tujuan lebih besar dari daerah asal dan kemungkinan mendapatkan

keuntungan yang lebih besar di daerah tujuan maka keputusannya adalah melakukan migrasi.

Model migrasi Todaro menyatakan juga bahwa keputusan migrasi tidak hanya ditentukan oleh berapa upah yang diterima seandainya migrasi dilakukan, tetapi memperhitungkan juga berapa besar peluang untuk mendapatkan pekerjaan. Dengan demikian upah yang besar belum tentu menarik pekerja untuk bermigrasi, sebaliknya upah yang relatif rendah akan cukup menarik calon migran jika peluang untuk mendapatkan pekerjaan relatif besar (Todaro, 1998).

### 3.1.5.2. Model Migrasi Skedul

Model migrasi skedul dikembangkan oleh Rogers. Rogers (1984) menemukan adanya keteraturan yang menonjol dalam skedul empiris tentang angka migrasi menurut umur yaitu pengelompokan tingkat migrasi berkenaan dengan umur. Penduduk muda yang berusia sekitar dua puluh tahun, biasanya menunjukkan angka migrasi yang paling tinggi dan umur remaja belia yang paling rendah. Angka migrasi anak-anak biasanya mencerminkan angka migrasi orang tua mereka, maka angka migrasi bayi melebihi angka migrasi anak-anak remaja.

Model migrasi skedul yang dirumuskan oleh Rogers (1984) adalah:

$$\text{MIG}(x) = a_1 \exp(-\alpha_1 x) + a_2 \exp\{-\alpha_2(x - \mu_2) - [-\lambda_2(x - \mu_2)]\} + a_3 \exp\{-\alpha_3(x - \mu_3) - [-\lambda_3(x - \mu_3)]\} + c \dots \dots \dots (3)$$

dimana :

MIG = jumlah migrasi pada usia x

$\alpha_1$  = tingkat penurunan dari komponen umur pra angkatan kerja

$\alpha_2$  = tingkat penurunan dari komponen umur angkatan kerja

$\alpha_3$  = tingkat penurunan dari komponen umur pasca angkatan kerja

$\lambda_2$  = tingkat peningkatan dari komponen umur angkatan kerja

- $\lambda_3$  = tingkat peningkatan dari komponen umur pasca angkatan kerja  
 $\mu_2$  = usia rata-rata angkatan kerja  
 $\mu_3$  = usia rata-rata pasca angkatan kerja  
 $c$  = konstanta  
 $x$  = usia migran,  $x = 0, 1, 2, \dots, z$

Model ini menunjukkan bahwa pada usia anak-anak, mereka melakukan migrasi keluar karena ikut orang tua mereka. Sehingga pada awalnya rata-rata migran usia anak-anak ini tinggi, tetapi kemudian terus menurun ketika usia bertambah. Ketika mereka beranjak dewasa, mereka tidak lagi tergantung pada orang tuanya. Orang tuanya boleh pergi atau tinggal. Pada saat usia dewasa, rata-rata migran pada usia ini meningkat lagi. Umumnya mereka migrasi karena sekolah atau cari kerja, puncaknya pada saat usia migran sekitar 20-24 tahun. Ketika mereka tua, mereka lebih senang melakukan migrasi keluar dan menemukan tempat yang tepat untuk menghabiskan masa tua mereka. Maka, diharapkan adanya puncak kedua, walaupun lebih rendah dari puncak pertama, pada usia tua. Kemudian para migran akan menetap selamanya.

### 3.1.5.3. Model Migrasi Dreher dan Poutvaara

Ketika memilih dimana harus menetap dan bekerja, maka migran akan membandingkan konsumsi utama dan aspek-aspek lain yang membuat kehidupan mereka menjadi lebih baik. Berdasarkan model migrasi Pedersen (2004), *expected utility* seorang individu  $k$  untuk negara  $j$  pada tahun  $t$  adalah

$$U_{ijkt} = U(S_{ijkt}, D_{ijkt}, X_{ikt}, X_{jkt}) \dots \dots \dots (4)$$

Dimana  $S_{ijkt}$  adalah vektor dari karakteristik yang mempengaruhi utilitas individu  $k$  untuk tinggal di negara  $j$  pada tahun  $t$ . Tetapi individu tersebut masih tinggal di

negara  $i$  pada tahun  $t-1$ . Vektor  $D$  merupakan biaya migrasi. Contoh, biaya migrasi cenderung lebih tinggi jika negara asal merupakan negara *land locked*, misalnya negara-negara yang hubungan daratnya kurang baik, sehingga mengharuskan mereka untuk menggunakan transportasi laut atau udara. Analisis Dreher dan Poutvaara (2005) mengenai aliran migran ke Amerika Serikat, jarak dari negara asal merupakan biaya migrasi.

Vektor  $X$  merupakan faktor penarik dan pendorong dari migrasi yaitu pendapatan (GDP) perkapita penduduk antara negara asal dan negara tujuan. Dalam beberapa spesifikasi, yang termasuk dalam vektor  $X$  adalah pertumbuhan ekonomi dan pengangguran di negara tujuan.

Dreher dan Poutvaara mengasumsikan utilitas individu berbentuk linier dan memasukkan *error term*  $\varepsilon$ , sehingga fungsi utilitas menjadi :

$$U_{ijkt} = \alpha_1 S_{ijkt} + \alpha_2 D_{ijkt} + \alpha_3 X_{ikt} + \alpha_4 X_{jkt} + \varepsilon_{ijkt} \dots\dots\dots (5)$$

dimana  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$  adalah parameter estimasi. Ketika memilih untuk migrasi, individu akan memilih negara  $j$  yang menghasilkan ekspektasi utilitas terbaik.

Berdasarkan fungsi utilitas tersebut, maka diturunkan model migrasi dari negara asal ke sembilan negara OECD, yaitu :

$$MIG_{ijkt} = \beta_1 S_{ijkt} + \beta_2 D_{ijkt} + \beta_3 X_{ikt} + \beta_4 X_{jkt} + \mu_{ijkt} \dots\dots\dots (6)$$

dimana  $MIG$  adalah jumlah migran,  $\beta$  adalah parameter estimasi dan  $\mu$  adalah *error term*. Secara spesifik migrasi ke Amerika Serikat adalah:

$$MIG_{iUSAkt} = \gamma_1 S_{iUSAkt} + \gamma_2 D_{iUSAkt} + \gamma_3 X_{ikt} + \gamma_4 X_{USAkt} + v_{iUSAkt} \dots\dots\dots (7)$$

Dengan menambahkan variabel lag migrasi dalam persamaan tersebut, maka persamaan (7) menjadi :

$$MIG_{iUSAkt} = \gamma_1 S_{iUSAkt} + \gamma_2 D_{iUSAkt} + \gamma_3 X_{ikt} + \gamma_4 X_{USAkt} + \gamma_5 MIG_{iUSAkt-1} + v_{iUSAkt} \dots\dots\dots (8)$$

Berdasarkan model-model migrasi tersebut, maka model migrasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah model migrasi yang dimodifikasi antara model migrasi Todaro (1998) dan model migrasi Dreher dan Poutvaara (2005).

## **3.2. Pasar Kerja**

### **3.2.1. Angkatan Kerja**

Tenaga kerja (*man power*) merupakan bagian dari penduduk pada kelompok umur tertentu yang diikutsertakan dalam proses ekonomi (Bellante dan Jackson, 1983). Tenaga kerja mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melakukan kegiatan lain seperti sekolah dan mengurus rumahtangga. Secara praktis pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja hanya dibedakan oleh batas umur. Tujuan pemilihan batas umur adalah agar defenisi yang diberikan dapat menggambarkan kenyataan yang sebenarnya. Setiap negara memilih batas umur yang berbeda karena situasi tenaga kerja pada masing-masing negara juga berbeda. Batasan umur yang digunakan di Indonesia saat ini adalah 10 tahun ke atas (Arfida, 2003).

Tenaga kerja adalah modal bagi bergeraknya roda pembangunan. Jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi. Secara umum pengukuran ketenagakerjaan dapat didekati dengan dua cara, yaitu : (1) *gainful worker approach* dan (2) *labour force appoach*. Dalam *gainful worker approach*, seseorang yang dikategorikan tenaga kerja akan ditanyakan kegiatan yang biasa dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Seseorang yang biasanya sekolah, tetapi saat survey sedang mencari pekerjaan, maka *gainful worker approach* akan dimasukkan dalam kategori sekolah Maka informasi mengenai pengangguran banyak yang hilang (Mantra, 1995).

Konsep angkatan kerja yang digunakan di Indonesia dalam pengumpulan data ketenagakerjaan adalah *labor force approach* yang disarankan oleh *International Labor Organization (ILO)*. Konsep ini membagi penduduk menjadi dua kelompok, yaitu penduduk usia kerja (tenaga kerja) dan penduduk bukan usia kerja (bukan tenaga kerja). Selanjutnya penduduk penduduk usia kerja dibedakan pula menjadi dua kelompok berdasarkan kegiatan utama yang sedang dilakukan, yaitu kelompok angkatan kerja dan bukan angkatan kerja (BPS, 1998).

Berkaitan dengan konsep tersebut, penduduk yang digolongkan pada kelompok angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yaitu 15 tahun ke atas yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Penduduk yang digolongkan bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lain. Tabel 7 menunjukkan perkembangan jumlah penduduk, penduduk usia kerja, angkatan kerja dan bukan angkatan kerja tahun 2000-2005.

**Tabel 7. Perkembangan Jumlah Penduduk, Penduduk Usia Kerja, Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Tahun 2000-2005 (Juta Orang)**

No	Uraian	Tahun					
		2000	2001	2002	2003	2004	2005
1.	Penduduk	205.3	208.9	212.0	215.2	217.7	219.21
2.	Penduduk Usia Kerja	141.2	144.0	148.4	152.6	153.9	155.55
3.	Angkatan Kerja	95.7	98.8	100.8	102.9	104.0	105.8
4.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	67.8	68.6	67.9	67.9	67.5	68.01
5.	Bekerja	89.8	90.8	91.6	92.8	93.7	94.95
6.	Bukan Angkatan Kerja	45.5	45.2	48.3	52.3	50.0	49.75
7.	Penganggur Terbuka	5.8	8.0	8.9	9.5	10.3	11.11

Sumber : Badan Pusat Statistik

Tabel 7 memperlihatkan tahun 2005 di Indonesia terdapat 155.6 juta penduduk usia kerja, sekitar 60.8 persen berada di pulau Jawa. Pada tahun yang sama Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 68.01 persen, artinya terjadi peningkatan dari tahun 2004. Peningkatan TPAK disebabkan oleh semakin tingginya jumlah penduduk yang tergolong pada usia kerja yang masuk kedalam golongan angkatan kerja (BPS, 2006).

### **3.2.2. Kesempatan Kerja**

Secara agregat jumlah orang yang bekerja yang dimuat dalam publikasi Badan Pusat Statistik, sering digunakan sebagai petunjuk tentang luasnya kesempatan kerja. Dalam pengkajian ketenagakerjaan, kesempatan kerja sering dijadikan acuan sebagai permintaan tenaga kerja (Arfida, 2003).

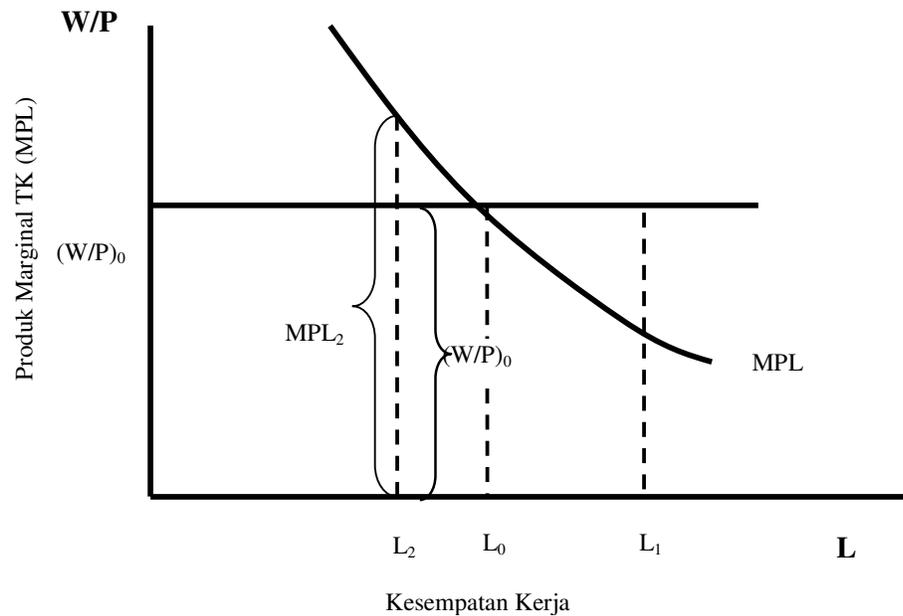
Kesempatan kerja atau permintaan tenaga kerja merupakan banyaknya orang yang bekerja pada berbagai sektor perekonomian, baik sektor pertanian, industri maupun jasa. Permintaan tenaga kerja merupakan permintaan turunan (*derived demand*), artinya permintaan tenaga kerja oleh suatu perusahaan tergantung pada permintaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut (Bellante dan Jackson, 1983).

Fungsi permintaan tenaga kerja berdasarkan teori neoklasik, dimana pada ekonomi pasar diasumsikan bahwa seorang pengusaha tidak dapat mempengaruhi harga (*price taker*). Pada kondisi ini untuk memaksimumkan keuntungan, pengusaha hanya dapat mengatur berapa jumlah pekerja yang dapat digunakan. Fungsi permintaan tenaga kerja didasarkan pada (Simanjuntak, 1998):

1. Perkiraan tambahan hasil (output) yang diperoleh sehubungan dengan penambahan seorang pekerja. Tambahan hasil tersebut dinamakan tambahan hasil marginal atau *Marginal Physical Product* dari pekerja ( $MPP_L$ ).
2. Perhitungan jumlah penerimaan yang diperoleh dengan tambahan hasil tersebut. Jumlah penerimaan ini dinamakan penerimaan marginal atau *Marginal Revenue* (MR). Maka, MR sama dengan nilai dari  $MPP_L$ , yaitu  $MPP_L$  dikali dengan harga produk (P) per unit, sehingga  $MR = VMPP_L = MPP_L \cdot P$ , dimana  $VMPP_L$  adalah *Value Marginal Physical Product of Labor*.
3. Pengusaha akan membandingkan MR dengan biaya mempekerjakan tambahan seorang pekerja. Jumlah biaya yang diperlukan untuk mempekerjakan tambahan seorang karyawan adalah upah (W). Jika  $MR > W$ , maka mempekerjakan seorang pekerja akan menambah keuntungan, karena pengusaha akan terus menambah jumlah pekerja selama  $MR > W$ .

Menurut Dornbusch dan Fisher (1997), perusahaan akan menggunakan tenaga kerja tambahan selama produk marginal tenaga kerja (*Marginal Product of Labor* atau MPL) melebihi biaya tenaga kerja tambahan. Biaya tenaga kerja tambahan ditentukan oleh tingkat upah riil. Upah riil mengukur jumlah output riil yang harus dibayar perusahaan kepada setiap pekerja. Jika dengan mengupah seorang tenaga kerja lagi akan menghasilkan output sebesar MPL dan biaya perusahaan atas upah riil, maka perusahaan akan mengupah tenaga kerja tambahan selama MPL melebihi upah riil

Skedul dengan kemiringan yang menurun pada Gambar 3 merupakan skedul permintaan tenaga kerja, yang merupakan skedul MPL, perusahaan akan mengupah tenaga kerja hingga titik dimana MPL sama dengan upah riil. Skedul MPL memperlihatkan kontribusi kesempatan kerja tambahan terhadap output.



**Gambar 3. Pilihan Kesempatan Kerja yang Optimal untuk Upah Riil Tertentu**

Gambar 3 memperlihatkan jika perusahaan menggunakan tenaga kerja  $L_1$ , dan upah riil adalah  $(w/P)_0$ , dimana  $w$  adalah upah nominal dan  $P$  adalah harga output. Pada tingkat kesempatan kerja  $L_1$ , perusahaan menggunakan banyak tenaga kerja karena upah riil melebihi MPL pada tingkat kesempatan kerja tersebut. Jika perusahaan harus mengurangi jumlah tenaga kerja yang digunakannya, maka penurunan kesempatan kerja ini akan mengurangi output sebesar MPL, sehingga akan mengurangi penerimaan perusahaan tersebut. Pada sisi lain pengurangan tenaga kerja akan menurunkan biaya upah tenaga kerja. Pada tingkat upah riil  $(w/P)_0$ , penurunan kesempatan kerja perunit akan menurunkan biaya upah nominal. Maka keuntungan bersih dari penurunan kesempatan kerja sama dengan kelebihan vertikal dari upah riil terhadap MPL. Berdasarkan gambar tersebut, terlihat bahwa pada tingkat kesempatan kerja  $L_1$ , kelebihan upah riil tersebut cukup besar, sehingga perusahaan harus mengurangi

jumlah kesempatan kerja hingga mencapai  $L_0$ . Pada titik tersebut biaya tenaga kerja tambahan mengimbangi keuntungan dalam bentuk kenaikan output (Dornbusch dan Fischer, 1997).

Pada tingkat kesempatan kerja  $L_2$ , kontribusi kesempatan kerja terhadap output  $MPL_{L_2}$  melebihi biaya upah riil tambahan, maka sangat bermanfaat jika kesempatan kerja ditambah. Pada upah riil  $(w/P)_0$ , keuntungan perusahaan akan maksimum jika kesempatan kerjanya adalah  $L_0$ . Posisi kesempatan kerja yang optimal dari perusahaan tersebut diwujudkan jika  $MPL(L)$  sama dengan upah riil:

$$MPL(L) = \frac{W}{P} \dots\dots\dots (12)$$

### 3.2.3. Upah

Teori neoklasik menganggap bahwa upah tenaga kerja ditentukan oleh permintaan tenaga kerja, yang diwakili oleh nilai produk fisik marjinal. Analisis neoklasik, terutama yang dikemukakan oleh Alfred Marshall, memandang upah ditentukan oleh interaksi permintaan (utilitas) dan penawaran (biaya produksi) tenaga kerja. Suatu kesimpulan penting dari teori neoklasik adalah ekonomi berada pada keseimbangan jika berada pada penggunaan tenaga kerja penuh. Penganut paham neoklasik tidak percaya akan adanya pengangguran, mereka menganggap bahwa pengangguran sebagai gejala ketidakseimbangan (Bellante dan Jackson, 1990).

Teori Keynes tentang keseimbangan pengangguran adalah konsep upah ketat dan tidak fleksibel. Menurut Keynes, upah tidak dapat bereaksi terhadap kelebihan penawaran tenaga kerja, yang berpengaruh adalah tingkat upah yang ada menjadi suatu variabel eksogen (tertentu). Perlakuan tingkat upah

sebagaimana ditentukan diluar sistem ekonomi makro membuka jalan bagi perkembangan dan penerimaan dari teori nonekonomi tentang penentuan upah. Teori-teori ini berkisar antara paham institusionalis hingga pendekatan yang bercorak adu untung. Kedua pendekatan ini memandang penentuan upah sebagai persoalan yang menyangkut kekuatan relatif serikat pekerja dan manajemen. Sangat ditekankan pada struktur penawaran (*bargaining*) kolektif. Teori penawaran ini memperlakukan proses penentuan upah sebagai suatu keterkucilan dari kekuatan pada pasar kerja (Bellante dan Jackson, 1990).

Pengertian upah di Indonesia berdasarkan pasal 1 angka 30 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan (Khakim, 2006).

Pengupahan merupakan masalah yang sangat krusial dalam bidang ketenagakerjaan dan bahkan jika tidak profesional dalam menangani masalah pengupahan, maka sering berpotensi timbulnya perselisihan dan mendorong timbulnya unjuk rasa. Penanganan pengupahan tidak hanya menyangkut aspek teknis dan aspek ekonomis saja, tetapi juga aspek hukum (Khakim, 2006).

Aspek teknis pengupahan meliputi perhitungan dan pembayaran upah, serta proses upah ditetapkan. Mulai dari penetapan upah minimum propinsi (UMP), upah minimum sektoral propinsi (UMSP), upah minimum kabupaten/kota (UMK), upah minimum sektoral kabupaten.kota (UMSK), dan upah sundulan. Aspek ekonomis pengupahan lebih melihat pada kondisi ekonomi secara makro

dan mikro, yang secara operasional mempertimbangkan kemampuan perusahaan pada saat nilai upah akan ditetapkan. Bagi perusahaan, upah merupakan biaya produksi sehingga kenaikan upah minimum mendorong produktivitas kerja pekerja dan tidak terlalu membebani perusahaan. Aspek hukum pengupahan meliputi proses dan kewenangan penetapan upah, pelaksanaan upah, perhitungan dan pembayaran upah, serta pengawasan pelaksanaan ketentuan upah.

Jika ditinjau dari perspektif pekerja/buruh, upah merupakan hak yang sangat mendasar bagi mereka, sehingga upah harus mendapat perlindungan secara memadai dari pemerintah. Upah merupakan motivasi pekerja dalam mencapai peningkatan kesejahteraan. Oleh karena pekerja/buruh merupakan faktor utama dalam proses produksi, maka selayaknya mereka memperoleh imbalan upah yang memadai. Harapan pekerja upah seharusnya dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum, yang meliputi pangan, sandang, papan, air, udara, bahan bakar pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, sarana komunikasi dan transportasi.

Berdasarkan perspektif pengusaha, upah adalah pengeluaran perusahaan untuk kesejahteraan pekerja yang merupakan bagian biaya produk yang dihasilkan, yang akhirnya akan mempengaruhi harga jual produk yang bersangkutan. Anggaran untuk biaya tenaga kerja berasal dari penerimaan perusahaan sehingga anggaran untuk biaya tenaga kerja sangat bergantung pada kelancaran penerimaan perusahaan. Oleh karena itu berdasarkan pandangan pengusaha pembayaran upah yang tinggi dapat dilakukan tetapi harus seimbang dengan produktivitas pekerja.

Pada era 1970-1980-an, pemerintah Indonesia tidak campur tangan dalam penetapan upah, tetapi kenyataan yang dihadapi adalah posisi tawar-menawar (*bargaining position*) pekerja di Indonesia masih sangat rendah, sehingga

pengusaha selalu menekan pekerja dengan upah yang sangat rendah. Oleh karena itu pemerintah mengubah kebijakan ketenagakerjaan, terutama menyangkut upah (Khakim, 2006).

Berbagai kebijakan mengenai upah telah ditempuh oleh pemerintah dalam memberi perlindungan kepada pekerja/buruh. Kebijakan upah minimum merupakan salah satu kebijakan yang ditempuh pemerintah karena adanya tekanan dari dalam dan luar negeri. Tekanan-tekanan tersebut timbul akibat dari kondisi perburuhan di negara Indonesia.

Secara teknis dasar hukum pengaturan upah minimum adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999 tentang upah minimum, yang disempurnakan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-226/MEN/2000 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-17/MEN/VII/2005 (Khakim, 2006).

Pengertian upah minimum menurut pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999 adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Tunjangan-tunjangan yang bersifat tidak tetap tidak termasuk dalam upah minimum.

Berdasarkan kebijakan tersebut, beberapa hal yang dipertimbangkan dalam penetapan upah minimum adalah:

1. Kebutuhan Hidup Minimum (KHM)
2. Indeks Harga Konsumen (IHK)
3. Kemampuan, perkembangan dan kelangsungan perusahaan
4. Upah yang umumnya berlaku didaerah tertentu dan antar daerah
5. Kondisi pasar kerja
6. Tingkat perkembangan perekonomian dan pendapatan perkapita.

Kebijakan upah minimum secara normatif merupakan jaring pengaman (*safety net*) bagi pekerja/buruh yang masih menerima upah dibawah ketentuan upah minimum. Tetapi sebagian pihak berpendapat bahwa kebijakan upah minimum sampai saat ini belum berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan pendapatan pekerja/buruh. Apalagi dalam situasi krisis ekonomi yang membuat pemenuhan kebutuhan hidup semakin berat. Dalam situasi ini, pengusaha juga menjustifikasi sebagai beban dunia usaha yang semakin berat. Akibatnya pengusaha terpaksa melakukan restrukturisasi manajemen perusahaan, yang salah satunya berimplikasi terhadap pengurangan tenaga kerja.

#### **3.2.4. Pengangguran**

Pengangguran merupakan masalah makroekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan yang paling berat. Lucas *dalam* Romer (1996) menyatakan bahwa pengangguran disebabkan kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pekerja dan pengusaha. Pekerja membuat kesalahan mengenai upah riil dan melepas pekerjaannya atau menolak pekerjaan yang ditawarkan karena upah yang terlalu rendah. Pengusaha juga membuat kesalahan tentang permintaan dan kadang-kadang memproduksi dalam jumlah yang terlalu kecil dan sedikit mempekerjakan pekerja. Oleh karena manusia merupakan makhluk yang rasional, yang melihat ke depan dalam membuat pengharapan, kesalahan akan diperbaiki dengan segera dan pengangguran akan hilang.

Pengangguran terjadi akibat dari kurangnya permintaan tenaga kerja dalam perekonomian dibandingkan jumlah pekerja yang menawarkan tenaganya, pada tingkat upah dan harga yang sedang berlaku. Meskipun demikian, terbuka kemungkinan bagi tingkat permintaan keseluruhannya mencapai taraf cukup

tinggi untuk memberikan kesempatan kerja bagi seluruh angkatan kerja, tetapi bagi sejumlah besar pekerja berada dalam keadaan menganggur. Para pekerja ini dapat digolongkan sebagai penganggur yang bersifat friksional maupun struktural (Bellante dan Jackson, 1990).

Pengangguran friksional merupakan pengangguran yang disebabkan oleh adanya ketidaklancaran dalam proses bertemunya penawaran dan permintaan tenaga kerja. Penyebab dari ketidaklancaran ini adalah karena tempat dan waktu. Pengangguran struktural terjadi akibat perubahan dominasi peranan ekonomi setiap sektor dalam kegiatan produksi maupun dalam pemberian kesempatan kerja. Banyak aspek pekerjaan yang mempunyai tuntutan atau persyaratan yang belum tentu dapat dipenuhi oleh penawaran tenaga kerja dari sektor atau subsektor lain (Arfida, 2003).

Pengangguran dapat juga disebabkan oleh kurangnya permintaan agregat. Permintaan total masyarakat merupakan dasar untuk diadakannya kegiatan investasi. Pengeluaran investasi memberikan peluang untuk tumbuhnya kesempatan kerja. Bila permintaan terhadap barang dan jasa lesu, maka akan menimbulkan kelesuan pada permintaan tenaga kerja, yang dapat mengakibatkan terjadinya pengangguran. Kurangnya permintaan agregat disini merupakan kondisi dalam jangka panjang. Profil yang perlu diketahui adalah tempat terjadinya pengangguran menurut sektor ekonomi, baik disektor pertanian maupun manufaktur, distribusi menurut pendidikan, jenis jabatan dan pekerjaan yang diminati, umur, dan jenis kelamin (Arfida, 2003)

Pengangguran merupakan salah satu masalah ketenagakerjaan di Indonesia yang tidak pernah surut. Para penganggur akan menjadi kelompok yang terpinggirkan, yang secara alamiah akan terbentuk McGee sebagai *proto*

*proletariat*, atau *massa apung/proletariat perkotaan* yang sangat berpotensi sebagai pengganggu stabilitas negara. Beberapa faktor penyebab masalah pengangguran di Indonesia adalah (Depnakertrans, 2004):

1. Orientasi kebijakan pembangunan ekonomi. Sistem ekonomi konglomerasi yang dijadikan sebagai *engine of growth* oleh Indonesia selama rezim orde baru sangat bertumpu dan mengandalkan aspek pertumbuhan. Pada saat itu perusahaan perusahaan besar tumbuh dengan pesat dan memperoleh *privilege* (hak istimewa) dari pemerintah. Akibatnya faktor kesempatan kerja penuh terabaikan, sehingga pengangguran semakin meningkat.
2. Kebijakan pengembangan sumberdaya manusia. Rendahnya perhatian pemerintah pada bidang pendidikan terlihat dari persentase pengeluaran pemerintah pada bidang tersebut. Pada sisi lain, pendidikan non formal atau pelatihan sebagai cara untuk mempersiapkan tenaga kerja siap pakai juga belum berjalan sesuai keinginan. Lembaga-lembaga pelatihan yang dikelola Depnakertrans belum mampu mengimbangi syarat-syarat edukasi yang diminta pihak pengusaha.
3. Daya saing industri. Asumsinya, bila industri memiliki daya saing yang kuat, maka industri akan maju, dan kesempatan kerja akan tercipta, dan pengangguran akan tertekan serendah mungkin. Demikian pula sebaliknya. Namun demikian, daya saing industri di Indonesia masih tergolong rendah, hanya beberapa golongan industri yang memiliki daya saing tinggi, seperti industri makanan, pengolahan tembakau, industri kayu, industri perabot dan kelengkapan rumah tangga, pulp dan kertas dan industri elektronik. Sementara industri tekstil dan pakaian jadi memiliki daya saing sedang, sedangkan industri kulit dan alas kaki memiliki daya saing rendah.

4. Globalisasi. Pada aspek ketenagakerjaan, aspek turunan dari globalisasi adalah persaingan bebas yang terjadi di dalam dan luar negeri. Pergerakan tenaga kerja dari satu negara ke negara lain semakin bebas, sehingga menjadi suatu tekanan bagi tenaga kerja yang tidak dapat bersaing. Pada sisi lain, bagi Indonesia dengan kondisi berlebihan tenaga kerja dan negara pengirim tenaga kerja ke luar negeri, globalisasi merupakan kesempatan untuk mengurangi penekanan dari tingginya jumlah pengangguran dan pekerja migran yang datang dari luar negeri.

### **3.3. Variabel Makroekonomi**

#### **3.3.1. Pendapatan Nasional**

Gross Domestic Product (GDP) mengukur pendapatan total setiap orang dalam perekonomian. Ada dua cara untuk melihat statistik ini yaitu melihat GDP sebagai pendapatan total dari setiap orang di dalam perekonomian dan GDP sebagai pengeluaran total atas output barang dan jasa dalam perekonomian (Mankiw, 2003).

Berdasarkan GDP sebagai pengeluaran total atas output barang dan jasa dalam perekonomian, maka GDP dibagi menjadi empat kelompok pengeluaran, yaitu: konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah dan ekspor bersih, maka:

$$GDP = CON + INV + GEX + NX \dots\dots\dots (13)$$

GDP adalah jumlah konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah dan ekspor bersih. Konsumsi (CON) adalah seluruh barang dan jasa yang dibeli rumah tangga. Investasi (INV) adalah barang-barang yang dibeli untuk penggunaan masa yang akan datang. Pengeluaran pemerintah (GEX) adalah barang dan jasa yang dibeli oleh pemerintah pusat dan daerah. Ekspor netto (NX) adalah nilai barang

dan jasa yang diekspor ke negara lain dikurangi nilai barang dan jasa yang diimpor dari negara lain.

### 3.3.2. Konsumsi

Keputusan konsumsi sangat penting dalam menentukan permintaan agregat. Konsumsi merupakan duapertiga dari GDP, sehingga fluktuasi konsumsi merupakan elemen penting dari *booming* dan resesi ekonomi. Teori konsumsi yang diajukan oleh Keynes merupakan salah satu teori yang menjadi dasar teori ekonomi makro. Keynes berpendapat bahwa pendapatan merupakan determinan konsumsi yang penting dan tingkat bunga tidak memiliki peranan yang penting. Estimasi ini berlawanan dengan teori klasik yang menyatakan bahwa tingkat bunga yang tinggi akan mendorong seseorang untuk menabung dan menghambat konsumsi. Fungsi konsumsi Keynes adalah sebagai berikut (Mankiw, 2003):

$$\text{CON} = a + b \text{ DIC} ; \quad a > 0 \text{ dan } 0 < b < 1 \quad \dots\dots\dots (14)$$

dimana :

CON = konsumsi

DIC = pendapatan disposibel

a = konstanta

b = kecenderungan mengkonsumsi marjinal.

Fungsi konsumsi ini menunjukkan kecenderungan mengkonsumsi marjinal (perubahan jumlah yang dikonsumsi pada setiap perubahan pendapatan =  $\Delta\text{CON}/\Delta\text{DIC}$ ) adalah antara nol dan satu, sehingga pendapatan yang tinggi akan menyebabkan konsumsi meningkat dan tabungan juga meningkat. Artinya, ketika seseorang menerima pendapatan ekstra, maka sebagian dari pendapatan tersebut akan dikonsumsi dan sebagian akan ditabung.

### 3.3.3. Investasi

Investasi merupakan unsur GDP yang paling sering berubah. Ketika pengeluaran barang dan jasa turun selama resesi, sebagian besar dari penurunan itu berkaitan dengan turunnya pengeluaran investasi. Perilaku investasi didasarkan dengan asumsi bahwa investor akan berperilaku memaksimalkan nilai kini (*present value*) dari manfaat finansial dari kegiatan investasi yang tersedia. Pengeluaran investasi sangat tergantung pada tingkat suku bunga, dimana  $I = I(r)$ . Tingkat investasi yang diinginkan atau direncanakan akan meningkat jika tingkat suku bunga turun. Kondisi ini disebabkan oleh tingkat bunga yang rendah menurunkan biaya modal, maka untuk memiliki barang-barang modal menjadi menguntungkan (Mankiw, 2003).

Sumber biaya investasi di Indonesia terdiri atas investasi pemerintah, investasi swasta domestik (PMDN), investasi swasta asing (PMA) dan investasi masyarakat (non-fasilitas). Pengeluaran investasi pemerintah secara langsung dipengaruhi oleh penerimaan pemerintah. Penerimaan pemerintah diutamakan untuk membiayai pengeluaran rutin pemerintah yang mencakup konsumsi pemerintah dan pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri. Oleh karena itu pembiayaan defisit anggaran pemerintah merupakan pembiayaan investasi pemerintah. Penerimaan pemerintah bersumber dari ekspor migas, pajak dan pinjaman luar negeri

Investasi swasta asing merupakan sumber pembiayaan investasi di banyak negara berkembang. Kondisi ini terutama disebabkan karena pada negara-negara berkembang seperti Indonesia, kemampuan menabung masih rendah. Sehingga sumber investasi asing menjadi alternatif yang tersedia untuk memenuhi target investasi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan mengalirnya investasi asing

dari negara asal ke negara tujuan, antara lain ketersediaan bahan baku, besarnya pasar (*market size*), harga bahan baku termasuk upah, suku bunga, dan nilai tukar.

Dalam meningkatkan investasi dalam negeri, bank memiliki peran penting dalam mengalokasikan sumber dana, dimana bank bertindak sebagai perantara antara orang-orang yang ingin menabung dan orang-orang yang memiliki proyek investasi yang menguntungkan tetapi memerlukan dana (Mankiw, 2003).

Berdasarkan pemikiran tersebut, perilaku investasi di Indonesia dirumuskan sebagai berikut :

$$INV = f ( SB, NTK, GDP, UMR) \dots\dots\dots (15)$$

dimana:

INV = total investasi

SB = suku bunga

NTK = nilai tukar

GDP = pendapatan nasional

UMR = upah minimum

#### **3.3.4. Pengeluaran Pemerintah**

Pada dasarnya setiap pengeluaran negara dilakukan atas landasan prinsip optimalisasi pemanfaatan dana untuk mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan. Pengeluaran pemerintah harus mampu mencapai beberapa sasaran, seperti peningkatan produktivitas kerja aparatur pemerintah, perluasan jangkauan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan serta terpeliharanya berbagai aset negara dan hasil-hasil pembangunan.

Pengeluaran pemerintah (*Government Expenditure*) adalah pengeluaran oleh pemerintah untuk membeli barang dan jasa. Sebagian dari pengeluaran

pemerintah adalah untuk membiayai administrasi pemerintahan atau pengeluaran rutin dan sebagian lainnya untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan atau pengeluaran pembangunan.

Pengeluaran rutin pemerintah terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, angsuran pinjaman/hutang dan bunga, ganjaran subsidi dan sumbangan pada daerah, pensiun dan bantuan, pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain, dan pengeluaran tak terduga.

Pengeluaran pembangunan adalah pengeluaran yang ditujukan untuk membiayai proses perubahan, yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju kearah yang ingin dicapai. Umumnya biaya pembangunan tersebut diprogramkan dalam Daftar Isian Proyek (DIP). Pengeluaran pembangunan semuanya diprogramkan dalam berbagai proyek di setiap sektor dan sub sektor. Pengeluaran pembangunan tersebut dialokasikan ke berbagai sektor sesuai dengan urutan prioritas dan kebijakan pembangunan (Pakasi, 2005).

Berdasarkan sektoral, pengeluaran pembangunan merupakan pengeluaran yang ditujukan untuk membiayai proyek disetiap sektor yang terdiri dari: sektor industri, pertanian dan kehutanan, sumberdaya air dan irigasi, tenaga kerja, perdagangan, transportasi, pertambangan dan energi, pariwisata, kependudukan, pendidikan, agama, hukum dan lainnya.

Berdasarkan Realisasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2003, pengeluaran pemerintah bersumber dari penerimaan pemerintah yang terdiri dari:

1. **Penerimaan Pajak** diperoleh dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri terdiri dari: pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah

dan bangunan, cukai dan pajak lainnya. Sedangkan pajak perdagangan internasional terdiri dari: bea masuk dan pajak ekspor.

2. **Penerimaan bukan pajak** terdiri dari: penerimaan sumberdaya alam, bagian laba BUMN, hibah dan penerimaan bukan pajak lainnya.

### 3.3.5. Ekspor Bersih

Pada perekonomian terbuka, pengeluaran suatu negara dalam satu tahun tidak perlu sama dengan yang mereka hasilkan dari memproduksi barang dan jasa. Suatu negara dapat melakukan pengeluaran yang lebih banyak daripada memproduksinya dengan meminjam dari luar negeri, atau dapat melakukan pengeluaran yang lebih sedikit dari produksinya dan memberi pinjaman kepada negara lain. Ekspor bersih memperhitungkan perdagangan dengan negara lain. Ekspor bersih adalah nilai barang dan jasa yang diekspor ke negara lain dikurangi nilai barang dan jasa yang diimpor dari negara lain (Mankiw, 2003).

Pengeluaran output dalam perekonomian terbuka terdiri atas empat komponen yaitu: konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah dan ekspor atas barang dan jasa domestik. Tiga komponen pertama adalah pengeluaran domestik untuk barang dan jasa domestik. Komponen keempat (EX) adalah pengeluaran luar negeri untuk barang dan jasa domestik. Jumlah pengeluaran domestik untuk barang dan jasa luar negeri adalah pengeluaran untuk impor (IM). Dengan demikian ekspor bersih adalah:

$$NX = GDP - ( CON + INV + GEX ) \dots\dots\dots (16)$$

Persamaan ini menunjukkan bahwa ekspor bersih adalah pengurangan antara output dan pengeluaran domestik. Jika output melebihi pengeluaran domestik, maka ekspor bersih adalah positif. Artinya kita mengekspor perbedaan tersebut.

Jika output lebih kecil dari pengeluaran domestik, kita mengimpor perbedaan tersebut, dan ekspor bersih adalah negatif (Mankiw, 2003).

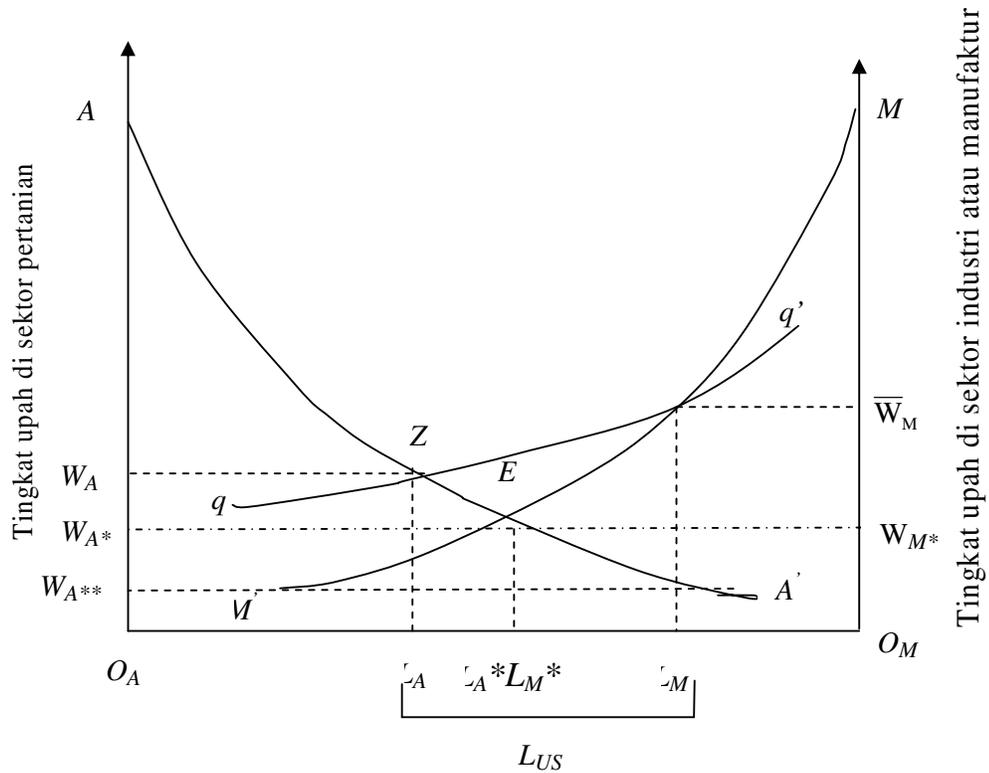
### **3.4. Hubungan antara Migrasi, Pasar Kerja dan Variabel Makroekonomi**

Migrasi merupakan perubahan tempat tinggal seseorang baik secara permanen maupun semi permanen, dan tidak ada batasan jarak bagi perubahan tempat tinggal tersebut (Lee, 1991). Proses migrasi internal dan internasional terjadi sebagai suatu reaksi dari berbagai perbedaan antara daerah asal dan daerah tujuan. Perbedaan ini disebabkan oleh faktor ekonomi, sosial dan lingkungan baik pada level individu maupun komunitas. Beberapa studi migrasi mengindikasikan bahwa migrasi terjadi terutama disebabkan oleh alasan ekonomi, yaitu untuk memperoleh pekerjaan dan pendapatan yang lebih tinggi. Maka dapat ditegaskan bahwa migrasi merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kualitas hidup.

Kondisi tersebut sesuai dengan model migrasi Todaro (1998) yang menyatakan bahwa arus migrasi berlangsung sebagai tanggapan terhadap adanya perbedaan pendapatan antara daerah asal dan daerah tujuan. Namun pendapatan yang dipersoalkan disini bukan pendapatan aktual, tetapi pendapatan yang diharapkan (*expected income*). Berdasarkan model ini, para migran mempertimbangkan dan membandingkan pasar tenaga kerja yang tersedia bagi mereka di daerah asal dan daerah tujuan, kemudian memilih salah satunya yang dianggap dapat memaksimalkan keuntungan yang diharapkan (*expected gains*).

Gambar 4 menunjukkan model migrasi Todaro yang menghubungkan antara migrasi dan pasar kerja. Model ini mengasumsikan perekonomian suatu negara hanya ada dua sektor, yaitu sektor pertanian di daerah asal dan sektor

industri di daerah tujuan. Permintaan tenaga kerja yang digambarkan oleh kurva produk marjinal tenaga kerja pada sektor pertanian digambarkan oleh garis AA'.



**Gambar 4. Hubungan Migrasi dan Pasar Kerja (Todaro, 1998)**

Sedangkan permintaan tenaga kerja sektor industri digambarkan oleh garis  $MM'$ . Total angkatan kerja yang tersedia disimbol dengan  $O_A O_M$ . Dalam perekonomian neoklasik (upah ditentukan oleh mekanisme pasar dan seluruh tenaga kerja akan terserap), upah ekuilibriumnya  $W_A^* = W_M^*$ , dengan pembagian tenaga kerja sebanyak  $O_A L_A^*$  untuk sektor pertanian, dan  $O_M L_M^*$  untuk sektor industri. Sesuai dengan asumsi *full employment*, seluruh tenaga kerja yang tersedia terserap habis oleh kedua sektor ekonomi tersebut.

Jika upah ditetapkan oleh pemerintah sebesar  $\bar{W}_M$ , yang terletak diatas  $W_A$ , dan diasumsikan tidak ada pengangguran maka tenaga kerja sebesar  $O_M L_M$  akan bekerja pada sektor industri di kota, sedangkan sisanya sebanyak  $O_A L_M$  akan

berada pada sektor pertanian di desa dengan tingkat upah sebanyak  $O_A W^{**}_A$ , yang lebih kecil dibandingkan dengan upah pasar yaitu  $O_A W^*_A$ . Sehingga terjadi kesenjangan upah antara desa dan kota sebanyak  $\bar{W}_M - W^{**}_A$ . Jika masyarakat pedesaan bebas melakukan migrasi, maka meskipun di desa tersedia lapangan kerja sebanyak  $O_A L_M$ , mereka akan migrasi ke kota untuk memperoleh upah yang lebih tinggi.

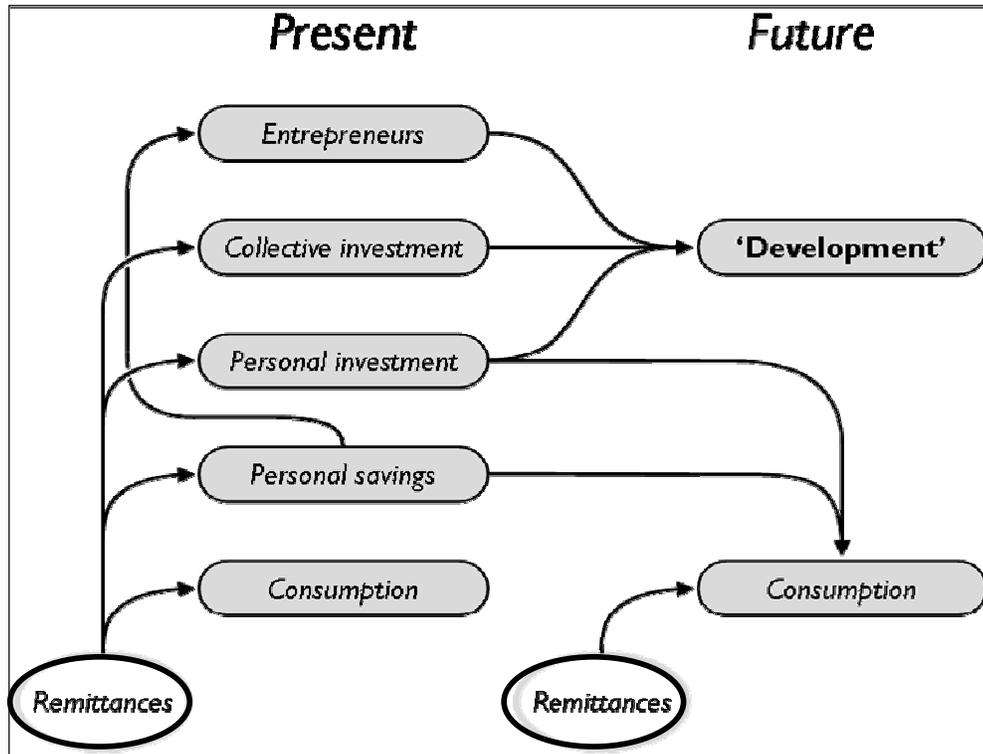
Adanya selisih tingkat upah desa-kota tersebut mendorong terjadinya arus migrasi dari desa ke kota. Titik-titik peluang tersebut digambarkan oleh garis  $qq'$ , dan titik ekuilibrium yang baru adalah Z. Selisih antara pendapatan aktual antara desa-kota adalah  $\bar{W}_M - W_A$ . Jumlah tenaga kerja yang masih ada pada sektor pertanian adalah  $O_A L_A$ , dan tenaga kerja disektor industri sebanyak  $O_M L_M$  dengan tingkat upah  $\bar{W}_M$ . Sisanya yakni  $L_{US} = O_M L_A - O_M L_M$ , akan menganggur atau memasuki sektor informal yang berpendapatan rendah.

Oleh karena migrasi internal menyebabkan pengangguran yang semakin tinggi di daerah perkotaan, maka migrasi internasional merupakan salah satu cara untuk menghadapi masalah tersebut. Migrasi internasional selain untuk mengatasi masalah pengangguran juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, karena umumnya upah pekerja di negara lain lebih tinggi daripada upah pekerja di Indonesia. Upah yang diterima oleh migran internasional akan dikirimkan kepada keluarganya yang berada di daerah asal.

Migrasi internasional dapat juga meningkatkan devisa negara melalui kiriman uang (*remittances*) dari pekerja di luar negeri kepada keluarganya di Indonesia. Kiriman uang tersebut digunakan untuk konsumsi dan menabung. Jika perhitungan pendapatan nasional ditinjau dari sisi pengeluaran, maka

peningkatan konsumsi masyarakat dapat meningkatkan pendapatan nasional. Demikian juga halnya jika kiriman uang tersebut digunakan untuk menabung, dan diasumsikan masyarakat menabung pada lembaga-lembaga keuangan, maka tabungan masyarakat tersebut dapat digunakan pihak investor untuk meningkatkan investasi dalam negeri. Selanjutnya peningkatan investasi secara langsung dapat meningkatkan permintaan tenaga kerja dan akhirnya juga akan meningkatkan pendapatan nasional.

Carling (2004) dalam penelitiannya mengenai berbagai kebijakan untuk meningkatkan keuntungan dari perolehan devisa tenaga kerja migran (*remittances*) di luar negeri menghubungkan antara *remittances* dan pembangunan ekonomi. Ia menyatakan bahwa jika *remittances* pada saat ini hanya digunakan untuk konsumsi, maka konsumsi yang akan datang akan dibiayai oleh *remittances* pada saat yang akan datang pula dan sumber-sumber pendapatan lainnya. Tetapi jika *remittances* tersebut digunakan untuk investasi atau di tabung, maka *remittances* tersebut dapat digunakan untuk keperluan konsumsi pada masa yang akan datang. Ketika *remittances* tersebut ditabung pada lembaga-lembaga keuangan, maka akan meningkatkan ketersediaan kredit dan memungkinkan pengusaha untuk melakukan investasi melalui peminjaman kredit tersebut yang akhirnya mempunyai dampak yang positif terhadap pembangunan ekonomi. Kondisi ini dapat dilihat pada Gambar 5.

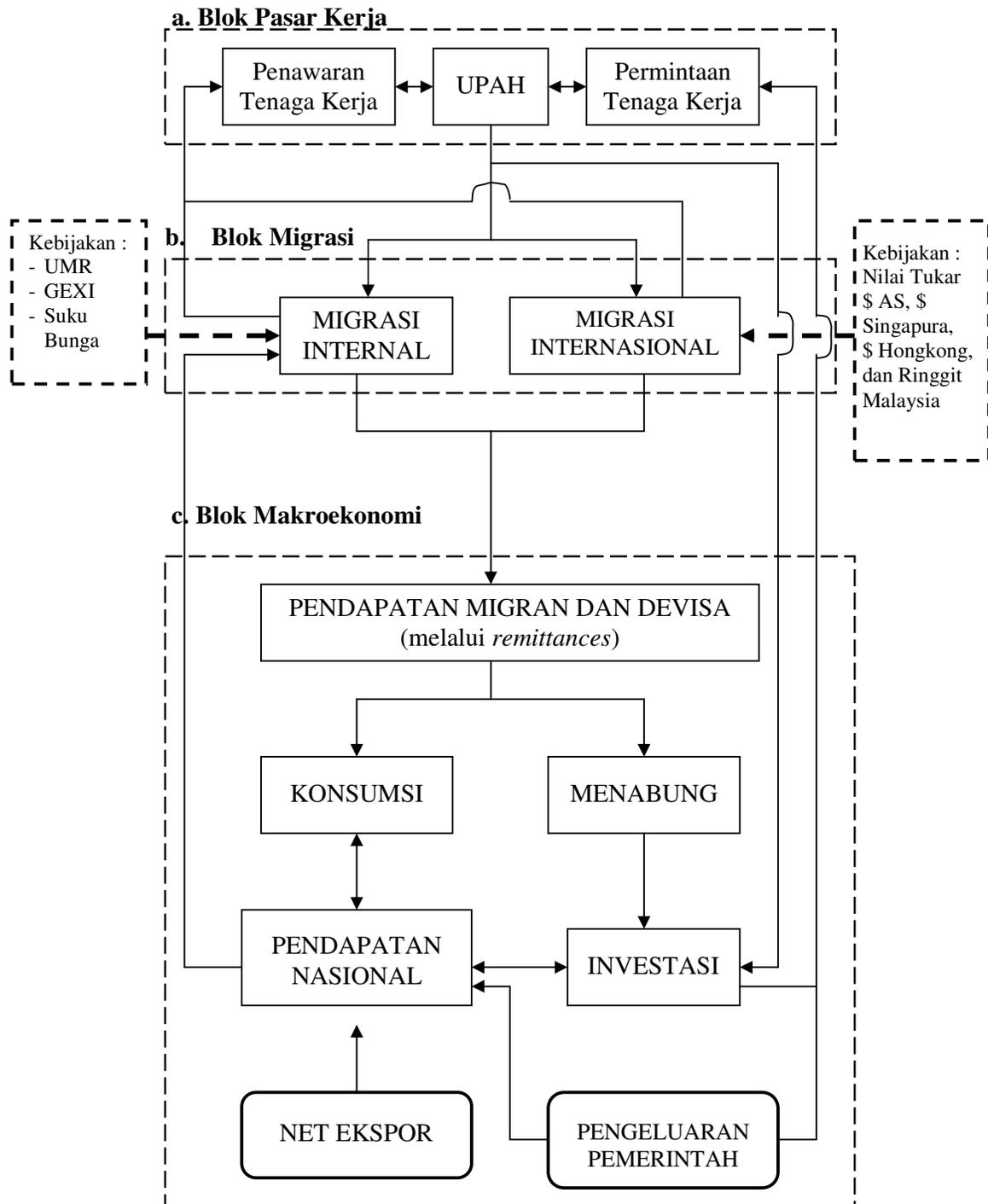


**Gambar 5. Keterkaitan antara Remittances dan Pembangunan Ekonomi (Carling, 2004)**

Gambar 6 menunjukkan hubungan antara migrasi, pasar kerja dan perekonomian di Indonesia. Berdasarkan gambar tersebut, terlihat keterkaitan antara migrasi, pasar kerja dan variabel-variabel makroekonomi. Pengeluaran pemerintah khususnya pengeluaran pembangunan merupakan salah satu kebijakan fiskal dan komponen penting pelaksanaan operasional Repelita di sektor pemerintah. Sesuai dengan prinsip anggaran berimbang, pengeluaran pemerintah selalu disesuaikan dengan penerimaan yang diperoleh, baik dari sumber dalam negeri maupun luar negeri.

Dalam kerangka alokasi anggaran pembangunan, pemilihan proyek-proyek pembangunan, didasarkan pada pendekatan sektoral dan alokasi regional. Kondisi

ini berarti penentuan proyek juga harus mempertimbangkan kriteria lokasi dimana proyek itu berada.



**Gambar 6. Hubungan Migrasi, Pasar Kerja dan Variabel Makroekonomi**

Pendekatan sektoral dan regional diperlukan agar proyek-proyek yang dibiayai dengan dana APBN dapat menghasilkan manfaat yang optimal, baik dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi maupun upaya pemerataan pembangunan dalam arti luas.

Ditinjau dari sisi tenaga kerja, dalam jangka pendek pengeluaran pembangunan dapat mengurangi jumlah pengangguran, karena jika pengeluaran pembangunan meningkat, maka semakin banyak proyek-proyek pembangunan yang dilaksanakan sehingga jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan juga meningkat. Kondisi ini juga menarik minat angkatan kerja baik dari daerah bersangkutan maupun daerah lain untuk terlibat dalam proyek pembangunan tersebut, sehingga migrasi penduduk tidak dapat dihindari.

Pengeluaran pembangunan bidang infrastruktur berfungsi untuk meningkatkan kondisi infrastruktur suatu daerah. Baiknya kondisi infrastruktur suatu daerah merupakan daya tarik bagi investor untuk memperluas aktivitas produksinya, sehingga dapat memperluas kesempatan kerja di daerah tersebut. Kondisi ini juga merupakan daya tarik bagi penduduk setempat untuk tetap tinggal di daerahnya, dan daya tarik pula bagi penduduk daerah lain untuk migrasi ke daerah tersebut.